

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinkes DIY) merupakan turunan dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinkes DIY. Adapun Renstra tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022.

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah DIY dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan kepala daerah dalam hal ini Gubernur DIY. RPJMD menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD DIY dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DIY pada tahun 2017-2022 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. RPJMD DIY Tahun 2017-2022 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) DIY sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan RKPD antara tahun 2018-2022 yang selanjutnya diturunkan dalam Renja OPD. Renja Dinkes DIY digunakan sebagai sinkronisasi kebijakan dan penyesuaian target pembangunan tahunan nasional dan daerah, pembangunan tahunan Daerah DIY dan kabupaten kota serta pembangunan tahunan antar daerah.

Dokumen Renja selanjutnya melalui proses secara beruntun hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Kemudian, dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan 2020, ditemukan beberapa kendala yang disebabkan oleh multi faktor, antara lain perubahan kebijakan, perubahan situasi kondisi masyarakat, terjadinya pandemi Covid-19 serta perubahan kebijakan dari level yang lebih tinggi di tataran Pemda DIY diwujudkan dengan Perubahan RKPD 2020. Berdasarkan Perubahan RKPD 2020 tersebut, maka Dinas Kesehatan DIY menyusun dokumen Perubahan Renja 2020.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
Latar Belakang.....	1-1
Landasan Hukum.....	1-3
Maksud dan Tujuan.....	1-5
Sistematika Penulisan	1-5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	2-1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	2-1
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-10
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2-24
Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	2-36
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	3-1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	3-1
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	3-3
Program dan Kegiatan.....	3-4
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	4-1
BAB 5 PENUTUP.....	5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-22
Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-11
Tabel 2-3 Capaian Kinerja 2019	2-17
Tabel 2-4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	2-21
Tabel 2-5 Target dan Realisasi Kinerja 2019	2-21
Tabel 2-6 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terdampingi Akreditasi	2-23
Tabel 2-7 Target dan Capaian Kinerja 2019	2-27
Tabel 2-8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-29
Tabel 2-9 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-34
Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan	3-3
Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	3-5
Tabel 4-1 Program dan Kegiatan 2020	4-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Pencapaian Indikator AHH.....	1-2
Gambar 2.1 Indikator Keluarga Sehat	2-19
Gambar 2.2 Susunan Organisasi Perangkat Daerah.....	2-25

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Pembangunan bidang kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan, terutama diarahkan pada meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawatdarutan dan rujukan khusus masyarakat miskin, menurunnya kejadian penyakit menular di masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan, meningkatnya sanitasi total berbasis masyarakat dan penanggulangan air minum, meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik.

Pembangunan kesehatan DIY sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional, pada hakekatnya merupakan suatu proses bersifat integratif baik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, namun harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Arah pembangunan kesehatan DIY telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Sedangkan secara teknis, arah pembangunan kesehatan 2019 teknis didasarkan pada rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019.

Derajat kesehatan sebagai indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) DIY tergantung kepada perkembangan angka kematian dan kesakitan. Dalam konteks kesehatan, kematian yang menjadi perhatian utama adalah kematian yang disebabkan oleh berbagai permasalahan kesehatan yang dalam hal ini dapat dibagi menjadi kematian umum dan kematian spesifik (kematian ibu, bayi dan balita). Kematian spesifik yang menjadi perhatian prioritas memiliki pengaruh besar terhadap umur harapan hidup dikaitkan dengan besaran yang dihasilkannya.



Gambar 1.2 Pencapaian Indikator AHH

Angka Harapan Hidup (AHH) di DIY selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016, tercatat angka harapan hidup di DIY adalah 74,75 tahun, melampaui angka harapan hidup pada tahun 2010 sebesar 74,1 tahun. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2019 AHH di DIY adalah 74,92. Kematian dipengaruhi oleh keberadaan penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular termasuk kecelakaan serta perilaku berbahaya seperti konsumsi narkoba.

Pelayanan kesehatan sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan, tersusun oleh beberapa program yang pada prinsipnya merupakan penggambaran dari upaya pelayanan komprehensif (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif). Upaya tersebut khususnya diberikan penekanan kepada upaya penanganan permasalahan pokok tanpa mengabaikan upaya-upaya lainnya. Permasalahan pokok dimaksud adalah kesehatan ibu, bayi, anak, penyakit tidak menular dan menular, gizi, perilaku sehat, lingkungan sehat dan mutu pelayanan kesehatan.

Upaya memberikan pelayanan yang optimal maka perlu didukung oleh penyediaan sumberdaya memadai yang terdiri sarana prasarana, sediaan farmasi, dan pembiayaan kesehatan yang memadai khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Keseluruhan upaya pelayanan dan penyediaan pelayanan perlu dikelola dan didukung kebijakan, manajemen dan administrasi yang memadai pula. Guna menyelaraskan hal-hal tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD), khususnya untuk tahun 2020.

Dokumen Renja selanjutnya melalui proses secara beruntun hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Kemudian, dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan 2020, ditemukan beberapa kendala yang disebabkan oleh multi faktor, antara lain perubahan kebijakan, perubahan situasi kondisi masyarakat, terjadinya pandemi Covid-19, serta perubahan kebijakan dari level yang lebih tinggi di tataran Pemda DIY diwujudkan dengan Perubahan RKPDP 2020. Berdasarkan Perubahan RKPDP 2020 tersebut, maka Dinas Kesehatan DIY menyusun dokumen Perubahan Renja 2020.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan DIY khususnya dan pembangunan kesehatan daerah pada umumnya untuk periode 1 tahun. Dokumen Renja Dinas Kesehatan DIY yang proses

saat ini sampai pada Perubahan Renja 2020, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, dan kelompok indikator kinerja beserta rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan. Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.

12. Landasan Hukum

Sebagai dasar hukum yang mendasari penyusunan renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1.2.2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 1.2.3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.5 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 1.2.6 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 1.2.7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 1.2.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 1.2.10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
- 1.2.11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 1.2.12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 1.2.13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 1.2.14 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi DIY
- 1.2.15 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi DIY 2005-2025
- 1.2.16 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2015

- tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;
- 1.2.17 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah DIY tahun 2018 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah DIY Nomor 3)
 - 1.2.18 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Tahun 2019;
 - 1.2.19 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
 - 1.2.20 Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2020 ttg Perubahan RKPD Tahun 2020 tgl 26 Agustus 2020

13. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinkes DIY tahun 2020 ini adalah sebagai terjemahan dari Renstra 2017-2022 Dinas Kesehatan DIY, yang selanjutnya disusun tahunan.. Selain itu, Perubahan Renja Dinkes 2020 juga disusun dengan penyesuaian yang diperlukan pada DPA 2020, serta penyesuaian dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 DIY. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinkes DIY tahun 2020 ini adalah untuk menyempurnakan tahap perencanaan sebelumnya yang tertuang dalam Renja Dinkes 2020 maupun DPA 2020, agar pembangunan kesehatan di DIY tahun 2020 lebih terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1. 4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamantkan untuk Oleh karena itu dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan DIY Tahun 2020.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan DIY Tahun 2020 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN. Tingkat keberhasilan instansi Dinas Kesehatan DIY Tahun 2020 dapat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan DIY 2017 – 2022. Renstra Dinas Kesehatan DIY merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan dengan berbasiskan data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat. Dari keseluruhan proses tersebut menghasilkan dokumen rencana strategis yang memuat visi dan misi Gubernur DIY, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Selanjutnya renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD atau Renja Perubahan OPD seperti saat ini melalui penyusunan Renja 2020. Namun demikian, Renstra telah mengalami perubahan dengan mengakomodasi pada perubahan organisasi mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, tugas Dinas Kesehatan DIY. Perubahan ini berimplikasi pada sturktur organisasi, program dan perubahan terkait lainnya.

Secara rinci gambaran pencapaian indikator keberhasilan Dinkes DIY dapat dilihat pada tabel berikut 2.1 berikut:

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020				
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	Urusan Wajib												
1	02	Bidang Urusan Kesehatan											
1	02	01	Program Kesehatan Masyarakat	Indikator 1: Persentase Balita Sehat	41.22%	38.94%	39.48	40.75	103	40.06	39.48	103	
				Indikator 2: Persentase Desa Sehat Mandiri	58.21%	25.91%	52.83	68.6	129	54.66	52.83	129	
1	02	01	01	Kegiatan : Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga	Penurunan Persentase Balita Kurus	0.4%	0.05%	0.1%	0.1%	100	0.2%	0.1%	100
					Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK)	1	0.125	0.25	0.25	100	0.5%	0.25	100
					Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4)	77	73	74	74	100	75%	74	100

					Peningkatan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	89	85	86	86	100	87%	86	100
1	02	01	02	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Perilaku Hidup Sehat Masyarakat	Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM	22.8	9.1	13.7	13.7	100	13.37%	9.1	100
					Persentase Jumlah TTU yang memenuhi syarat	96	88	90	90	100	92%	90	100
					Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri	51.14	48.17	48.86	48.86	100	49.77%	48.86	100
					Persentase terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas	100	9.92	29.75	29.75	100	60.33%	29.75	100
					persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD	100	9.92	100	100	100	100%	100	100
1	02	02		Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Indikator: Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84	53.58	56.33	70.43	125	58.92%	56.33	100
1	02	02	01	Kegiatan : Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan	Persentase jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I	95	89	90.65	90.65	100	92.05%	90.65	100

				Surveilans penyakit potensial wabah									
					Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	100	100	100	100	100	100	100
1	02	02	02	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kasus kematian DBD di Fasyankes dilakukan audit klinis	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	100	<1 per 100.000	<1 per 100.000	100
					Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pneumoni lebih dari 60%	100	20	40	40	100	60%	40	100
					Persentase Cakupan penemuan TB	40	32	34	34	100	36%	34	100
					persentase penderita HIV yang menerima pengobatan ARV	72	64	66	66	100	68	66	100
					Annual Parasite Incidence	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 permil	< 1 permil	100	< 1 permil	< 1 permil	100
					persentase PJPD ditemukan	17.5%	7.5%	10%	10	100	12.5%	10%	100
					persentase kasus jiwa diketemukan	17.5%	7.5%	10%	10	100	12.5%	10%	100
					persentase DM diketemukan	17.5%	7.5%	10%	10	100	12.5%	10%	100
					Persentase Kanker diketemukan	100	2	10	10	100	4	5	100
1	02	03		Program; Pelayanan Kesehatan	Indikator: Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan	54.85	38.37	41.08	44.02	107	48.08	41.08	100

					Lainnya sesuai Standar Pelayanan								
1	02	03	01	Kegiatan : Peningkatan pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan pelayanan kesehatan lain	FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan	245/243	75/170	141/182	182/262	128,3	192/213	141/182	100
					FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu.	237	80	120	120	100	204	172	100
					persentase calon jemaah haji yang terlayani istito'ah	100	100	100	100	100	100	100	100
1	02	04		Program : Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Indikator 1: Jumlah FKTP, FKTL dan Fasyankes lainnya memenuhi standar dibagi jumlah Fasyankes dikali 100	80.19	40.58	50.24	51.2	101	62.32	50.24	100
					Indikator 2: Persentase Kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai Standar	86.48	66.92	72.05	73.14	101	76.79	72.05	100
1	02	04	01	Kegiatan : Peningkatan Mutu Tenaga, Sarana dan Jaminan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana	85.71	70.92	82.65	82.65	100	83.67	82.65	100
1	02	04	04	Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian,	1 . Jumlah sarana pelayanan kesehatan dan produksi distribusi kefarmasian	287	215	236	236	100	256	236	100

				sediaan farmasi dan Perbekes serta pengendalian makanan									
					2 . Persentase Makanan Memenuhi Syarat	75	55	60	60	100	65	60	100
					3 . Ketersediaan Obat	137	130	133	133	100	135	133	100
1	02	05		PROGRAM : Pelayanan Kesehatan Pada Balabkes	Indikator: Jumlah Layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan dan kebutuhan Masyarakat	15	9	11	11	100	13	11	100
1	02	05	01	Kegiatan : Pelayanan Laboratorium kesehatan	Indikator : Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat	1	1	1	1	100	2	1	100
1	02	06		PROGRAM: Peningkatan Pelayanan Pelatihan Kesehatan Pada Blud Bapelkes	Indikator : Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	68	60	62	78.46	126.5	64	62	100
1	02	06	01	Kegiatan: Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah pelatihan yang dievaluasi	6	2	3	3	100	4	3	100
1	02	07		PROGRAM : Peningkatan	Indikator 1: Persentase Penduduk	100	100	100	100	100	100	100	100

				Pelayanan Kesehatan Pada Bapel Jamkesos	Miskin yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan								
					Indikator 2: Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	26	20	22	22	100	24	22	100
1	02	07	01	Kegiatan : Pelayanan Jaminan Kesehatan	Indikator : persentase jenis layanan jamkesos yang diakses Masyarakat	100	76.92	84.62	84.62	100	92.31	84.62	100
					Cakupan Jamkes Penyangga	100	96	98	98	100	100	98	100
					Cakupan Jamkes Preventif	12	4	6	6	100	8	6	100
					Cakupan Jamkes Rehabilitatif	25	5	10	10	100	15	10	100
1	02	08		Program Pelayanan Kesehatan Pada Blud Rsj Grhasia	Indikator 1: Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)	90%	86	87	97.38	111.9	88	87	100
					Indikator 2: Angka Pasien Cidera karena Fiksasi	1%	7	4	0	0	3	4	100
					Indikator 3: Waktu Tunggu Pelayanan Obat jadi \leq 30 menit	90%	82	84	83.55	99.4	86	84	100
					Rata rata jam pelatihan karyawan per tahun	80	70	72	79.88	110.9	75	72	100
					Waktu tunggu Pelayanan Rawat Jalan jiwa \leq 60 menit	75	63	66	64.66	97.9	69	66	100
					Tingkat Penggunaan	65%	58	60	48.74	81.2	62	60	100

					Tempat Tidur/ Bed Occupancy Rate (BOR)								
					Penyelesaian Berkas pengajuan klain pasien jaminan kesehatan	80%	76	77	77	100	78	77	100
					Penyusunan laporan tahunan rumah sakit	85%	81	82	85	103.6	83	82	100
					Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai Analisis Beban Kerja	90%	86	87	85.88	98.7	88	87	100
					Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit	100%	70	80	80	100	90	80	100
1	02	08	01	Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Jiwa, NAPZA, dan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan Pendidikan	Indikator: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan kesehatan lainnya serta pelayanan pendidikan melalui sub kegiatan sbb: 1. Pelayanan Keperawatan 2. Pelayanan Penunjang 3. Pelayanan Medis 4. Pelayanan Sekretariat 5. Pelayanan Pendidikan	100	100	100		-	100	100	100
1	02	09		Program Pelayanan Kesehatan	Indikator 1: Angka Keberhasilan Pengobatan (success	86%	82%	83%	84.87	102.25	84%	81.8%	100

				Pada Blud Rs Paru Respira	rate) TB								
					Indikator 2: Angka kematian pasien \geq 48 Jam	1%	2.5%	2%	0.76	263.16	1.5%	2.08%	100
					Indikator 3: Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	80 orang	75 orang	80 orang	142	177.5	80 org	91 org	100
					Indikator 4: Bed occupancy Rate (BOR)	60%	60%	60%	45.91	76.51	60%	37.52%	100
					Indikator 5: Lenght of Stay (LOS)	5%	5 hari	5 hari	2.89	173.01	5 hr	3.05 hr	100
1	02	09	01	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	Terselenggaranya pelayanan kesehatan paru dan pernapasan sesuai dengan tata laksana (100%) untuk mendukung k berhasilan pengobatan pasien (81,1%)	100%	100	100	100	100	100	100	100
				SPM	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			16.462	16.462	100			
					Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi			24.239	24.239	100			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, tugas Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan DIY sesuai Bab III Pasal 5, adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- e. penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- f. pengelolaan sumber daya kesehatan;
- g. pengembangan upaya kesehatan tradisional;
- h. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
- i. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
- j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan DIY memiliki 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 87 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan. UPT tersebut adalah Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Rumah Sakit Paru Respira, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Balai Pelatihan Kesehatan, dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial.

Analisis kinerja pelayanan Dinkes DIY dapat dilihat di tabel 2.2. berikut:

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Indikator 1: Persentase Balita Sehat			38.94%	39.48%	40.06%	40.64%	41.22%	38.94%	40.75%	40.06%	40.64%	41.22%
	Indikator 2: Persentase Desa Sehat Mandiri			25.91%	52.83%	54.66%	56.43%	58.21%	25.91%	68.6%	54.66%	56.43%	58.21%
	Penurunan Persentase Balita Kurus			0.05%	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.05%	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%
	Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK)			0.125	0.25%	0.5%	0.75%	1%	0.125	0.25	0.5%	0.75%	1%
	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4)			73%	74%	75%	76%	77%	73%	74%	75%	76%	77%
	Peningkatan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)			85%	86%	87%	88%	89%	85%	86%	87%	88%	89%
	Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM			9.1%	13.7%	18.3%	22.8%	22.8%	9.1%	13.7%	18.3%	22.8%	22.8%
	Persentase Jumlah TTU yang memenuhi syarat			88%	90%	92%	94%	96%	92.2%	90%	92%	94%	96%
	Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri			48.17%	48.86%	49.77%	50.46%	51.14%	50%	48.86%	49.77%	50.46%	51.14%
	Persentase terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas			9.92	29.75	60.33	80.17	100	9.92%	29.75%	60.33	80.17	100
	persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD			9.92	100	100	100	100	9.92	100	100	100	100

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Indikator: Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			53.58%	56.33%	58.92%	61.26%	62.84%	53.58%	70.43%	58.92%	61.26%	62.84%
	Persentase jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I			89.3%	90.65%	92.05%	92.05%	93.4%	89.3%	90.65%	92.05%	92.05%	93.4%
	Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kasus kematian DBD di Fasyankes dilakukan audit Klinis			<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000
	Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pneumoni lebih dari 60%			20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%
	Persentase Cakupan penemuan TB			32%	34%	36%	38%	40%	36%	34%	36%	38%	40%
	persentase penderita HIV yang menerima pengobatan ARV			64%	66%	68%	70%	72%	64%	66%	68%	70%	72%
	Annual Parasite Incidence			< 1 permil	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 Permil	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 permil	< 1 permil
	persentase PJPD ditemukan			7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%
	persentase kasus jiwa diketemukan			7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%
	persentase DM diketemukan			7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%
	Persentase Kanker diketemukan			2%	3%	4%	5%	5%	3%	3%	4%	5%	5%
	Indikator: Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai Standar Pelayanan			38.37%	41.08%	48.08%	52.37%	54.85%	38.37%	44.02%	48.08%	52.37%	54.85%

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan			75/170	141/182	192/213	234/232	245/243	75/170	182/262	192/213	234/232	245/243
	FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu.			120	172	204	236	237	120	120	204	236	237
	persentase calon jemaah haji yang terlayani istito'ah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator 1: Jumlah FKTP, FKTL dan Fasyankes lainnya memenuhi standar dibagi jumlah Fasyankes dikali 100			40.58	50.24	62.32	71.98	80.19	40.58	51.2	62.32	71.98	80.19
	Indikator 2: Persentase Kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar			66.92	72.05	76.79	81.07	86.48	66.92	73.14	76.79	81.07	86.48
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana			70.92	82.65	83.67	84.69	85.71	70.92	82.65	83.67	84.69	85.71
	1 . Jumlah sarana pelayanan kesehatan dan produksi distribusi kefarmasian			215	236	256	275	287	215	236	256	275	287
	2 . Persentase Makanan Memenuhi Syarat			55	60	65	70	75	55	60	65	70	75
	3 . Ketersediaan Obat			130	133	135	137	137	130	133	135	137	137
	Indikator: Jumlah Layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan dan kebutuhan masyarakat			9	11	13	14	15	9	11	13	14	15
	Indikator : Jumlah layanan			1	2	2	2	2	1	1	2	2	2

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat												
	Indikator : Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya			60	62	64	66	68	60	78.46	64	66	68
	Jumlah pelatihan yang dievaluasi			2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	Indikator 1: Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator 2: Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan			20	22	24	25	26	20	22	24	25	26
	Indikator : persentase jenis layanan jamkesos yang diakses masyarakat			76.92	84.62	92.31	96.15	100	76.92	84.62	92.31	96.15	100
	Cakupan Jamkes Penyangga			96	98	100	100	100	96	98	100	100	100
	Cakupan Jamkes Preventif			4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
	Cakupan Jamkes Rehabilitatif			5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
	Indikator 1: Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)			86	87	88	89	90	91.46	97.38	88	89	90
	Indikator 2: Angka Pasien Cidera karena Fiksasi			7	4	3	2	1	0	0	3	2	1
	Indikator 3: Waktu Tunggu Pelayanan Obat jadi \leq 30 menit			82	84	86	88	90	81.97	83.55	86	88	90

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Rata rata jam pelatihan karyawan per tahun			70	72	75	78	89	102	79.88	75	78	89
	Waktu tunggu Pelayanan Rawat Jalan jiwa ≤ 60 menit			63	66	69	72	75	42	64.66	69	72	75
	Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/ Bed Occupancy Rate (BOR)			58	60	62	64	65	49.29	48.74	62	64	65
	Penyelesaian Berkas pengajuan klain pasien jaminan kesehatan			76	77	78	79	80	77	77	78	79	80
	Penyusunan laporan tahunan rumah sakit			81	82	83	84	85	85	85	83	84	85
	Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai Analisis Beban Kerja			86	87	88	89	90	80.3	85.88	88	89	90
	Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit			70	80	90	95	100	70	80	90	95	100
	Indikator: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan kesehatan lainnya serta pelayanan pendidikan melalui sub kegiatan sbb : 1. Pelayanan Keperawatan 2. Pelayanan Penunjang 3. Pelayanan Medis 4. Pelayanan Sekretariat 5. Pelayanan Pendidikan			100	100	100	100	100	100		100	100	100
	Indikator 1: Angka Keberhasilan Pengobatan (success rate) TB			82%	83%	84%	85%	86%	82%	84.87%	84%	85%	86%
	Indikator 2: Angka kematian			2.5%	2%	1.5%	1%	1%	0.7%	0.76%	1.5%	1%	1%

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	pasien > 48 jam												
	Indikator 3: Rata-rata kunjungan rawat jalan per Hari			75 orang	80 org	80 org	80 org	80 org	76 orang	142 org	80 org	80 org	80 org
	Indikator 4: Bed occupancy Rate (BOR)			60%	60%	60%	60%	60%	36.04 %	45.91%	60%	60%	60%
	Indikator 5: Lenght of Stay (LOS)			5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	2.91 hari	2.89hr	5 hari	5 hari	5 hari
	Terselenggaranya pelayanan kesehatan paru dan pernapasan sesuai dengan tata laksana (100%) untuk mendukung k berhasilan pengobatan pasien (81,1%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Hasil evaluasi 2019 terhadap sasaran strategis, didapatkan bahwa semua sasaran strategis Dinas Kesehatan DIY tercapai. Pencapaian ini dilihat dari capaian indikatornya yang kesemuanya tercapai. Secara detail, capaian indikator Dinas Kesehatan DIY 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya perilaku sadar sehat	1 Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	149
2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	2 Persentase Pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	67.18	73.28	109
3	Pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	3 Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	60	76	127
4	Pelayanan kesehatan Paru yang bermutu	4 Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru	%	74.8	74.8	100

1. Terwujudnya Perilaku Sadar Sehat

Pencapaian sasaran Terwujudnya perilaku sadar sehat diukur dengan indikator Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga. Indikator ini juga mengakomodasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016. Program ini memiliki tujuan diantaranya adalah meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:

- a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*);
- c. penanggulangan penyakit menular; dan
- d. penanggulangan penyakit tidak menular.

Selain itu, pemilihan indikator ini juga mengacu pada kebijakan Gubernur DIY tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 44 Tahun 2017. Yogyakarta Sehat Lestari adalah kondisi kesehatan yang dicita-citakan warga Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana perilaku sehat, peri kehidupan sehat, penerapan norma dan nilai hidup sehat, akan menjadi budaya yang melekat di dalam masyarakat untuk

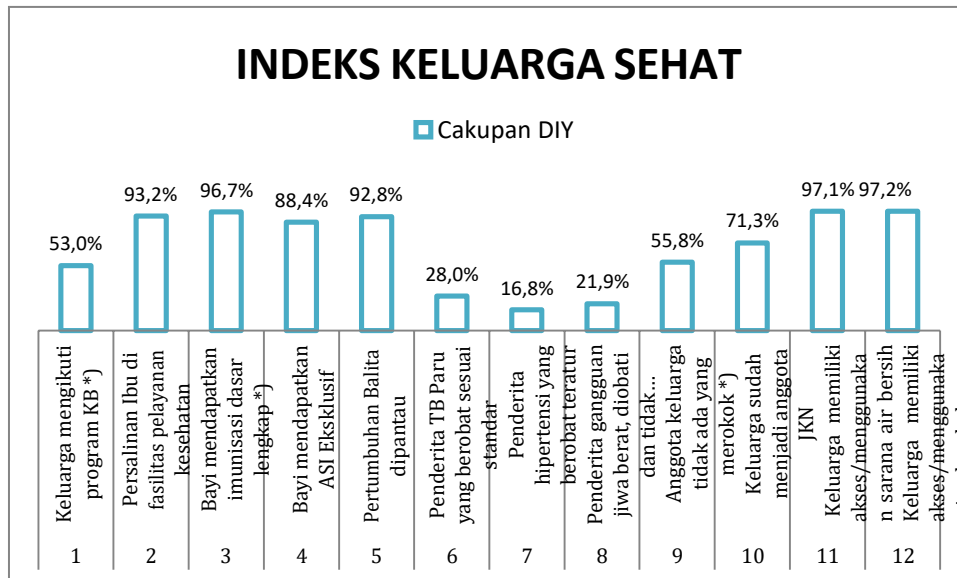
meningkatkan kualitas hidupnya. Puskesmas adalah elemen utama. Tujuan PISPK adalah memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan:

- a. melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
- b. membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas;
- c. menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas;
- d. melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan
- f. melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.

Tujuan akhir target puskesmas yang melaksanakan PIS PK adalah tercapainya Indikator Keluarga Sehat (IKS). Parameter keluarga dianggap sehat jika terpenuhi:

1. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Hasil pendataan PISPK diinput langsung dalam aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan melalui <https://keluargasehat.kemkes.go.id/>. Namun hasil pendataan belum semua dapat dikembalikan kedaerah untuk dapat dimanfaatkan. Masih ada data yang diproteksi oleh Kementerian Kesehatan sehingga hasilnya belum diketahui. Berikut adalah hasil yang sudah dapat diakses oleh puskesmas di wilayah DIY:



Sumber <https://keluargasehat.kemkes.go.id/>

Gambar 2.1. Indikator Keluarga Sehat

Beberapa catatan terkait data diatas adalah sebagai berikut:

- Untuk TB, masih ada yang melewatkan prosedur pemeriksaan yang seharusnya sehingga ada yang tidak terkonfirmasi pemeriksaan bakteriologi sebelumnya.
- Hipertensi umumnya masih dianggap sebagai hal yang lumrah dan bukan penyakit yang mengancam. Sehingga banyak penderita yang enggan melakukan pengobatan secara teratur.
- Hal yang sama juga terjadi pada penderita gangguan jiwa. Pengobatan baru dilakukan ketika dirasakan mengancam keselamatan anggota keluarga lain atau mengganggu lingkungan sekitar.
- Terkait indikator tentang merokok, angka merokok masih tinggi. Namun kesadaran untuk tidak merokok didalam rumah mulai nampak.
- Indikator yang terkait JKN, KB dan Kesehatan Lingkungan

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Pada grafik ini terlihat bahwa sebagian masyarakat sudah menjadi anggota JKN. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang enggan mendaftar secara mandiri. Disisi lain untuk PBI masih ada persoalan pada pendataan. Ada masyarakat miskin namun tidak terdaftar sebagai PBI dan sebaliknya ada masyarakat yang secara ekonomi mampu mendaftar secara mandiri namun malah masuk sebagai PBI. Pada proses transisi ini, DIY masih menyediakan pembiayaan melalui Bapel Jamkessos untuk masyarakat miskin yang tidak dibiayai

oleh BPJS dan juga kasus khusus sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2016. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di DIY dengan penerapan fungsi pendampingan melalui program Jamkes Penyangga dan pengembangan komplemen JKN dengan Jamkes Preventif dan Rehabilitatif.

- Di DIY sebagian besar keluarga telah memiliki akses penggunaan sarana air bersih. Di beberapa tempat masih ada masyarakat yang belum memiliki akses terkait faktor geografi (Di wilayah Kulon Progo dan Gunung Kidul) dan juga kondisi ekonomi yang tidak mampu membeli air bersih. Untuk jamban sehat, di beberapa lokasi masyarakat masih memakai jamban yang dikategorikan sebagai jamban sehat semi permanen dan juga jamban *sharing*. Ini juga berhubungan dengan faktor ekonomi dan faktor geografis yang sulit mengakses air bersih.

Faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

1. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung percepatan pelaksanaan PISPK oleh puskesmas. Dukungan dana ini memacu persiapan untuk pelaksanaan PISPK menjadi jauh lebih cepat.
2. Pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PISPK serta mengkomunikasikan persoalan teknis ke pusat.

Tantangan yang masih harus diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan tenaga enumerator dalam pelaksanaan pendataan PISPK dengan cakupan penduduk di DIY. Tenaga di Puskesmas tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus didata.
2. Responden kurang kooperatif dengan menyembunyikan fakta fakta masalah kesehatan yang dialami dan sebagian sulit ditemui. Ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah rasa malu, melihat itu sebagai hal pribadi dan rahasia dan juga karena kesibukan
3. Data yang sudah dientry melalui aplikasi kepusat (Kementerian Kesehatan) tidak bisa sepenuhnya kembali ke puskesmas karena proteksi data oleh Kementerian Kesehatan.
4. Intervensi terkait temuan temuan yang didapatkan dilapangan

Strategi untuk pencapaian Target Berikutnya:

1. Peningkatan Kompetensi tenaga surveyor terutama kemampuan menggali data, memverifikasi dan melakukan observasi. Mengantisipasi kemungkinan ada informasi data yang tidak benar dari responden
2. Perekrutan tenaga enumerator yang berasal dari Non PNS untuk mempercepat proses pendataan
3. Mengkomunikasikan kebijakan pendataan PISPK dan pemanfaatannya bagi daerah dengan Kementerian Kesehatan

2. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

Tolok ukur capaian sasaran **Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu** diukur dengan 1 indikator yaitu indikator Persentase Pelayanan Kesehatan yang Bermutu. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tingkat lanjut (FKTL) dan pelayanan kesehatan lain yang sudah terakreditasi dibagi seluruh FKTP/FKTL dan Fasilitas Kesehatan Lain dikali 100

Kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan indikator Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Baseline 2018	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%) Target
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	66.41	67.18 176	73.28	109	66.41	67.18 176

Indikator ini dipilih karena akreditasi menjadi bagian dari sebuah penjaminan mutu pelayanan di sektor kesehatan. Untuk Rumah Sakit (RS) Salah satu upaya peningkatan mutu adalah melalui akreditasi setiap tiga tahun sekali sebagai amanah UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. Regulasi yang dibangun dalam akreditasi yang mendorong fasilitas pelayanan kesehatan khususnya RS untuk menerapkan tata kelola manajerial dan tata kelola klinik yang baik untuk meningkatkan mutu RS dan melindungi keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi, mendukung program pemerintah dibidang kesehatan dan meningkatkan profesionalisme dan daya saing rumah sakit Indonesia dimata internasional.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan. Peraturan tentang akreditasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Bahwa Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS. Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan.

Dalam upaya ini, Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan telah melaksanakan pendampingan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung proses akreditasi. Juga dukungan melalui workshop, pertemuan koordinasi, sosialisasi instrumen untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya proses akreditasi untuk dilakukan.

Tabel 2.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terdampingi Akreditasi

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah FKTP/FKTL	Jumlah FKTP/FKTL Yang Terdampingi Akreditasi
Puskesmas	121	121
RS	78	65

Sumber : Seksi Mutu Akreditasi Dinas Kesehatan DIY

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

1. Regulasi PMK Nomor 99 tahun 2015 tentang Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 41 ayat (1) dan (2) pada tahun 2020, seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus terakreditasi.
2. Regulasi Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. Regulasi tersebut diikuti dengan pembuatan petunjuk teknis akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi, pelatihan pendampingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pelatihan akreditasi puskesmas, bimbingan teknis dan pendampingan oleh Dinas Kesehatan DIY dan kabupaten/kota.
3. Peran serta surveyor lokal dengan memberikan asistensi bagi puskesmas yang membutuhkan pendampingan
4. Sosialisasi, bimbingan teknis akreditasi oleh Dinas Kesehatan DIY Provinsi dan Kabupaten/Kota, penguatan komitmen seluruh tenaga Puskesmas , pemenuhan anggaran pendampingan dan akreditasi Puskesmas yang berasal dari DAK non fisik serta validasi data sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas sebelum di *entry* ke dalam aplikasi ASPAK.

Tantangan yang masih harus diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Masalah Ketenagaan masih menjadi masalah mendasar terutama bagi RS dalam melaksanakan akreditasi.
2. Mekanisme monitoring paska akreditasi belum berjalan optimal, sedangkan petunjuk teknis baru ada di tahun 2018
3. Tenaga Kesehatan yang mampu memenuhi syarat sebagaimana diminta dalam akreditasi masih terbatas. Ini berhubungan dengan Kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan yang juga memiliki kapasitas terbatas
4. Ijin pengelolaan limbah medis juga menjadi kendala bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan akreditasi

Strategi untuk pencapaian Target Berikutnya:

1. Pembinaan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk mempertahankan penerapan standar mutu pelayanan, serta pembinaan lanjut bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum memenuhi standar mutu;
2. Mendorong RS untuk mampu melaksanakan rekrutmen tenaga yang dibutuhkan.

3. Meningkatkan kapasitas pelatihan di Balai Pelatihan Kesehatan
4. Membuat komitmen dan kerjasama dengan instansi terkait perijinan limbah

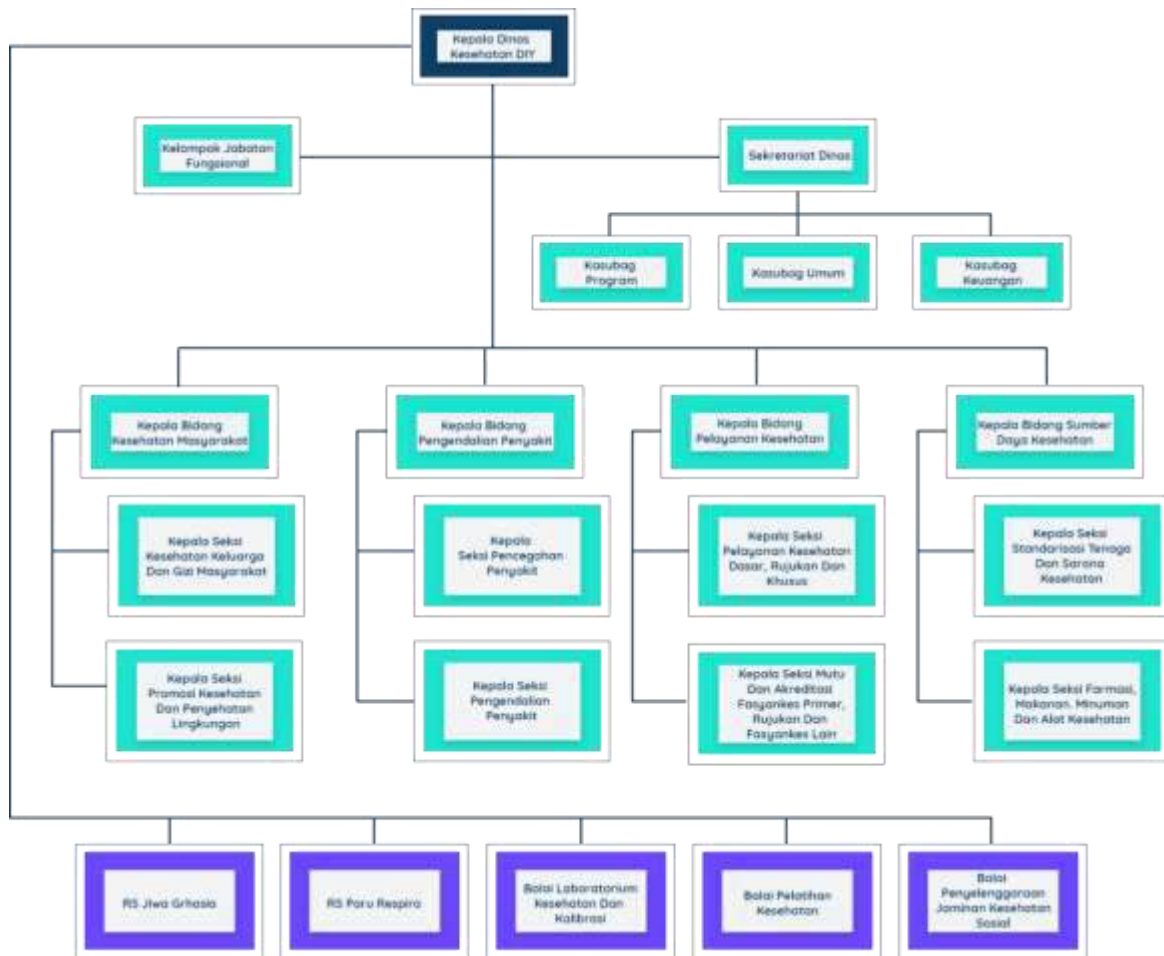
Pencapaian sasaran Terwujudnya perilaku sadar sehat diukur dengan indikator Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan Rumah Tangga, ditetapkan sebagai salah satu dari dua Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan DIY disamping indikator pelayanan kesehatan yang bermutu. Indikator PHBS merupakan indikator komposit yang terdiri dari 10 indikator mencakup gambaran kesehatan individu dan rumah tangga, yaitu

- 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
- 2) Memberi bayi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
- 3) Menimbang Balita setiap bulan
- 4) Menggunakan air bersih
- 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- 6) Menggunakan jamban sehat
- 7) Memberantas jentik dirumah seminggu sekali
- 8) Makan sayur dan buah setiap hari
- 9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari
- 10) Tidak merokok di dalam rumah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015 -2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan



Sasaran pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam RPJMN 2015 - 2019 adalah :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
3. Meningkatnya pemerataan mutu pelayanan kesehatan
4. Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan.

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP), masih terdapat beberapa isu lingkungan yang harus mendapatkan perhatian. Dari proses pra pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang

selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 8 isu yaitu :

1. Kesetaraan derajat kesehatan DIY dibandingkan berbagai wilayah di Asia tenggara
2. Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita
3. Status Gizi
4. Kematian akibat penyakit tidak menular
5. Potensi endemisitas penyakit menular
6. Mutu dan akses pelayanan kesehatan
7. Jaminan dan pembiayaan kesehatan
8. Bencana, wabah dan kecelakaan

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP), masih terdapat beberapa isu lingkungan yang harus mendapatkan perhatian. Dari proses pra pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 5 isu yaitu :

- a) Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam
- b) Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian
- c) Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah
- d) Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal
- e) Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP), masih terdapat beberapa isu lingkungan yang harus mendapatkan perhatian. Dari proses pra pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 5 isu yaitu :

- a) Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam

- b) Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian
- c) Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah
- d) Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal
- e) Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2009-2029 dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Bantul 2010-2030, Dinkes DIY telah berupaya menyesuaikan dengan ketentuan RT/RW dimaksud dalam rangka mengembangkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

a. Faktor Penghambat Pelayanan

Untuk pelayanan kesehatan rujukan di RS adalah

- Rasio persebaran jumlah dan kelas rumah sakit yang belum merata terutama untuk kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo berimplikasi pada akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan rumah sakit
- Adanya kebijakan sistem regionalisasi rujukan sehingga berpengaruh pada kabupaten kota yang belum memiliki rumah sakit rujukan yang sesuai klasifikasi dan kompetensi yang diharapkan oleh masyarakat

b. Faktor Pendorong Pelayanan

- sumber daya kesehatan
 - Adanya desentralisasi bidang kesehatan
 - Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
 - Adanya pembiayaan kesehatan
 - Institusi pendidikan kesehatan yang memadai
 - Masyarakat yang berdaya
 - Kebijakan lokal sistem rujukan berbasis kompetensi

Hasil capaian indikator Renstra Dinas Kesehatan DIY tidak lepas dari kontribusi hasil capaian Renstra Dinas Kesehatan kabupaten/ kota. Sebaliknya hasil tersebut juga telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI.

**Tabel 2.7. Tabel Target dan Capaian Kinerja
2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	3	4	5	6	7
1	Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	149

2	Persentase Pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	67.18	73.28	109
3	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	60	76	127
4	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru	%	74.8	74.8	100

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY, tidak dapat terlepas dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang baik pada tatanan Pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah.

Isu-isu pokok dan atau strategis tersebut yang menjadi masalah prioritas adalah:

- a. Gizi dan kesehatan ibu dan anak, yang meliputi *Stunting*, WUS KEK (Wanita Usia Subur Kekurangan Energi Kronik), Kematian Ibu, dan Kematian Bayi.
- b. Penyakit tidak menular yang meliputi *Diabetes* Melitus, PJPD (Penjakit Jantung dan Pembuluh Darah)/Hipertensi, Gangguan Jiwa, Kanker (Ca), dan Napza.
- c. Penyakit menular, yang meliputi HIV AIDS, Tuberkulosis, DBD, Pneumonia dan Penyakit potensial KLB/ wabah.
- d. Pelayanan kesehatan, yang meliputi akreditasi dan sumber daya manusia termasuk kesiapan dalam penanganan kedaruratan dan bencana, dalam hal tahun 2020 ini bencana yang terjadi adalah bencana non alam berupa Pandemi Covid-19.
- e. Pelayanan kesehatan tradisional, yang merupakan amanahkeistimewaan

Selanjutnya Dinas Kesehatan DIY memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah responsif terhadap isu-isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari langkah responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam usulan program/kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2020.

2.4. Review terhadap RKPD

Review terhadap RKPD yang tertuang dalam RKPD disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi dari segi anggaran yang direncanakan, serta indikator keluaran dan hasil, masih perlu dilakukan perubahan. Perubahan rencana anggaran ini dibutuhkan karena terdapat perubahan kebutuhan menyesuaikan kondisi masyarakat sasaran serta kebijakan, dan juga dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Review ini membantu memetakan selisih antara kebutuhan dengan RKPD. Secara garis besar perubahannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2-8 Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinkes DIY sesuai Perubahan Tahun 2020
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan DIY

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
					(Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	DIY	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rp. 2.070.226.700,00	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	DIY	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rp. 2.070.226.700,00	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			100 %	Rp 1,194,259,500.00	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			100 %	Rp 1,194,259,500.00	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			100 %	Rp 822,919,200.00	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			100 %	Rp 822,919,200.00	
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi			100 %	Rp 53,048,000.00	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi			100 %	Rp 53,048,000.00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DIY	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rp. 441.375.533,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DIY	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rp. 441.375.533,00	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			100 %	Rp 62,200,000.00	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			100 %	Rp 62,200,000.00	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor			100 %	Rp 133,805,533.00	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor			100 %	Rp 133,805,533.00	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			100 %	Rp 157,385,000.00	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			100 %	Rp 157,385,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan			100 %	Rp 87,985,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan			100 %	Rp 87,985,000.00	

	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	DIY	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		Rp 45,515,500.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	DIY	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		Rp 45,515,500.00	
	Pengembangan ISO			100 %	Rp 45,515,500.00	Pengembangan ISO			100 %	Rp 45,515,500.00	
	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu			100 %	0	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu			100 %	0	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	DIY			Rp. 77.615.280,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	DIY			Rp. 77.615.280,00	
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD			100 %	Rp 4,300,000.00	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD			100 %	Rp 4,300,000.00	
	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi			100 %	Rp 69,015,280.00	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi			100 %	Rp 69,015,280.00	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD			100 %	Rp 4,300,000.00	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD			100 %	Rp 4,300,000.00	
	Program Kesehatan Masyarakat	DIY	- Persentase Desa Sehat Mandiri '- Persentase Balita Sehat	40.0 6% 54.6 6%	Rp. 9.166.917.000,00	Program Kesehatan Masyarakat	DIY	- Persentase Desa Sehat Mandiri '- Persentase Balita Sehat	40.0 6% 54.6 6%	Rp. 9.166.917.000,00	
	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat				Rp 129,595,000.00	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola				Rp 129,595,000.00	

Masyarakat					Hidup Sehat Masyarakat				
Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga				Rp 72,487,000.00	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga				Rp 72,487,000.00
Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat (DAK)				Rp 6,484,676,000.00	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat (DAK)				Rp 6,484,676,000.00
Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga (DAK)				Rp 2,480,159,000.00	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga (DAK)				Rp 2,480,159,000.00
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	DIY	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.92%	Rp. 2.203.939.800,00	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	DIY	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.92%	Rp. 2.203.939.800,00
Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah				Rp 1,606,139,800.00	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah				Rp 1,606,139,800.00
Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular				Rp 597,800,000.00	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular				Rp 597,800,000.00
Program Pelayanan Kesehatan	DIY	- Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	48.08%	Rp. 143.615.900,00	Program Pelayanan Kesehatan	DIY	- Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	48.08%	Rp. 143.615.900,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain				Rp 139.080.900,-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan				Rp 139.080.900,-

						Kesehatan Lain				
	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain				Rp 4,535,000.00	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain				Rp 4,535,000.00
	Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan	DIY	- Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan - Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	62.3 2 % 76.7 9%	Rp. 377.886.000,00	Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan	DIY	- Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan - Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	62.3 2 % 76.7 9%	Rp. 377.886.000,00
	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan				Rp 34,514,000.00	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan				Rp 34,514,000.00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)				Rp 309,867,000.00	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)				Rp 309,867,000.00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) (DAK)				Rp 33,505,000.00	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) (DAK)				Rp 33,505,000.00

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES	DIY	Dipertahankannya mutu pelayanan laboratorium	100%	Rp. 13.904.938.682,00	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES	DIY	Dipertahankannya mutu pelayanan laboratorium	100%	Rp. 13.904.938.682,00
Pelayanan Laboratorium Kesehatan				Rp 12,810,726,682.00	Pelayanan Laboratorium Kesehatan				Rp 12,810,726,682.00
Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DAK)				Rp 1,094,212,000.00	Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DAK)				Rp 1,094,212,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES	DIY	Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	64%	Rp 6,510,349,078.00	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES	DIY	Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	64%	Rp 6,510,349,078.00
Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan				Rp 6,510,349,078.00	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan				Rp 6,510,349,078.00
PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS	DIY	- Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan - Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	25 layanan 100%	Rp 32,033,924,065.00	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS	DIY	- Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan - Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	25 layanan 100%	Rp 32,033,924,065.00
Pelayanan Jaminan Kesehatan				Rp 32,033,924,065.00	Pelayanan Jaminan Kesehatan				Rp 32,033,924,065.00
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA	DIY			Rp. 28.266.091.329,00	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA	DIY			Rp. 28.266.091.329,00
Pelayanan Kesehatan Jiwa			88%	26,015,150,900.00	Pelayanan Kesehatan Jiwa			88%	26,015,150,900.00
Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)				Rp 2,250,940,429.00	Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)				Rp 2,250,940,429.00
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA	DIY	Angka Keberhasilan Pengobatan (Sucess Rate) TB	84%	Rp. 26.447.132.068,00	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA	DIY	Angka Keberhasilan Pengobatan (Sucess Rate) TB	84%	Rp. 26.447.132.068,00

Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan				Rp 24,744,745,497.00	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan				Rp 24,744,745,497.00
Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan (DAK)				Rp 1,702,386,571.00	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan (DAK)				Rp 1,702,386,571.00

Pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada bagian lampiran, memuat Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, maka sebagian besar program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi adalah memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/ Kota, disamping program dan kegiatan yang langsung ditujukan ke masyarakat. Dinas Kesehatan juga mengampu usulan program dari pemangku kepentingan yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Palang Merah Indonesia (PMI) DIY, yang ditujukan untuk mendukung kesekretariatan (operasional). Sejak diberlakukannya Pergub No Tahun 2012 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial, Dinkes DIY juga mengakomodir dana hibah dan memfasilitasi bantuan keuangan khusus dari usulan kabupaten/ kota.

Tabel 2.9. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
2010	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	172.570.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	108.000.000
2011	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	89.990.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	179.669.000

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
2012	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	270.815.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	389.342.200
2013	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	286.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	243.662.800
2014	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	292.398.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	239.801.000
2015	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	400.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	400.000.000
2016	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	463.229.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	620.000.000
2017	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	564.818.000

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	443.156.000
2018	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	420.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peingkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	BKK RSUD Wates	70.000.000.000
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	DIY	BKK Jambanisasi	1.036.000.000
2019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY DIY	PMI	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	BKK Pembangunan RSUD Wates	70.000.000.000
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	DIY	BKK Jambanisasi	2.000.000.000

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
2020	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	PMI	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan lain	DIY	BKK Pembangunan RSUD Wates	40.810.000.000
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	DIY	BKK Jambanisasi	3.378.000.000

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2020.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Tujuan Kementerian Kesehatan tahun 2015 - 2019 adalah :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Sedangkan pembangunan di DIY 2019, selain mengacu pada nawacita, juga sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang tertuang dalam visi Gubernur DIY 2017-2022, yaitu menyongsong "abad samudra hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja" dan misi pancamulia, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritorial ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasamalu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agenda pembangunan di DIY tahun 2020 terkait dengan prioritas pembangunan diharapkan dapat memberikan *trigger* penurunan angka kemiskinan di DIY. Upaya pencapaian tema pembangunan tahun 2020 dilaksanakan melalui skema tematik pembangunan yang didukung lintas sektor, lintas perangkat daerah, dan lintas kabupaten/kota. Arah kebijakan pembangunan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial disusun dengan berdasarkan pada sasaran pembangunan yang menjadi fokus pada tahun 2020, yaitu penurunan ketimpangan wilayah, penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pembangunan bandara YIA, dan pembiayaan pembangunan.

Mengacu pada 4 isu tematik tersebut, maka kegiatan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan DIY pun harus sejalan dengan 4 isu tematik tersebut disamping kegiatan rutin yang memang harus dilaksanakan Dinas Kesehatan DIY. Namun untuk pembangunan 2020, kegiatan Dinas Kesehatan hanya mendukung 3 kebijakan pembangunan kesehatan, yaitu :

1. Isu pembangunan bandara Yogyakarta International Airport, yaitu melalui pembangunan RSUD Wates dan pengembangan kesehatan tradisional.

2. Isu penanggulangan kemiskinan, yaitu melalui upaya penjaminan kesehatan oleh Bapel Jamkesos dan Bantuan keuangan khusus untuk sanitasi, khususnya jamban.
3. Isu pembiayaan pembangunan, untuk 2020 dilakukan dengan penemuan penderita dan pendampingan pengobatan TB-HIV, pelayanan jamkesus disabilitas, dan melalui kepesertaan mandiri jamkesos.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penurunan Jumlah kasus kematian ibu	37	36	35	34	34
		Penurunan Jumlah kasus kematian bayi	340	336	327	323	318
		Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	15.8	15.7	15.6	15.7	15.4

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya perilaku sadar sehat	Persentase Puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan Pendekatan Keluarga	42,97 (52 P)	67,77 (82 P)	100 (121 P)	100 (121 P)	100 (121 P)
2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	64.83 170	66.84 176	68.86 181	70.87 186	73.12 192

3.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan, sesuai dengan arah pembangunan kesehatan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan hal hal / isu strategis maka akan ditempuh melalui berbagai program/kegiatan yang terinci dalam usulan Dinas Kesehatan DIY tahun 2020. Secara rinci, rencana kerja perubahan yang dituangkan dalam usulan tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (mengacu matrik di bawahnya tapi bukan semula menjadi)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020(tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KESEHATAN								
	Dinas Kesehatan								
	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		100%				100%	Rp 2.123.524.702,24
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			100%	Rp 1.454.594.000			100%	Rp 1.125.866.000
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			100%	Rp 911.110.000			100%	Rp 858.288.702.24
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi			100%	Rp 264.241.000			100%	Rp 139.370.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		100%				100%	Rp 504.190.000,-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			100%	Rp 228.200.000			100%	Rp 48.000.000,-
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor			100%	Rp 160.000.000			100%	Rp 168.000.000,-

		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		100%	Rp 322.580.000			100%	Rp 203.905.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		100%	Rp 83.970.000			100%	Rp 84.285.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD					100%	Rp 32.000.000,-
		Pengembangan I S O		100 %	Rp 81.130.000			100%	Rp 32.000.000,-
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan						100	Rp 106.986.000,-
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		100%	Rp 11.141.000			100%	Rp 5.192.000,-
		Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data		100 %	Rp 195.404.000			100%	Rp 95.205.000,-

		dan Informasi							
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	'- Persentase Balita Sehat - Persentase Desa Sehat Mandiri	'- 40.06 % - 54.66 %	Rp 11.997.000			100%	Rp 6.589.000,-
		Program Kesehatan Masyarakat	- Persentase Balita Sehat - Persentase Desa Sehat Mandiri	40.06% 54.66%				40.64% 56.43%	Rp 2.259.810.000,-
		Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat			Rp 4.416.220.000				Rp 2.017.375.000,-
		Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga			Rp 554.727.000				Rp 242.435.000,-
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.92%					Rp 1.895.112.400
		Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah			Rp 576.223.000				Rp 606.948.400,-
		Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			Rp 1.773.479.000				Rp 1.288.164.000,-
		Program Pelayanan Kesehatan	- Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya	48.08 %				52.37%	Rp 1.103.616.100

			Sesuai Standar Pelayanan						
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain			Rp 42.181.397.000				Rp 1.021.448.500,-
		Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain			Rp 258.762.000				Rp 82.167.600,-
		Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan	- Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDM dan Pembiayaan	62.32 %				71.98%	Rp 941.948.500,-
			- Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	76.79 %				81.07%	
		Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan			Rp 377.748.000				Rp 259.021.000,-
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)			Rp 382.427.000				Rp 682.927.500,-
		PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES	Dipertahankannya mutu pelayanan laboratorium	100%					Rp 10.856.148.900
		Pelayanan			Rp 12.448.992.000				

		Laboratorium Kesehatan							
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES	Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	64 %				66%	Rp 5.454.068.764
		Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan			Rp 6.775.042.000				
		PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS	- Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan - Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	25 layanan 100%				- 26 layanan - 100%	Rp 37.146.810.500
		Pelayanan Jaminan Kesehatan			Rp 40.493.842.000				
		PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA	Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)	88 %				90%	Rp 24.899.296.000
		Pelayanan Kesehatan Jiwa			Rp 22.722.437.000				
		PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA	Angka Keberhasilan Pengobatan (Sucess Rate) TB	84 %				85%	Rp 20.000.000.000
		Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan			Rp 11.520.056.000				

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perubahan 2020

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Pagu : Rp. 1.194.259.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Wajib								
1.02	KESEHATAN								
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan								
1.02.1.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								
1.02.1.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	24. Pemeliharaan alat-alat kantor	24. Pemeliharaan alat-alat kantor	24. 5 jenis	24.4 jenis	Rp 1,579,744,000.00	Rp 1,194,259,500.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		23. Sewa tanah tower antena repiter PSC 119	23. Sewa tanah tower antena repiter PSC 119	23. 1 paket	23.1 paket				
		22. Sewa aplikasi avaya call center 119	22. Sewa aplikasi avaya call center 119	22.1 paket	22.1 paket				
		21. Belanja penggandaan	21. Belanja penggandaan	21.44438 lembar	21.1 paket				
		01. Pemusnahan arsip	01. Pemusnahan arsip	01.100 boks dokumen	01.100 boks dokumen				
		02. Belanja ATK	02. Belanja ATK	02.68 jenis	02.14 jenis				
		03. Belanja alat listrik	03. Belanja alat listrik	03. 12 bulan	03. 14 jenis				
		04. Belanja benda pos	04. Belanja benda pos	04. 1 jenis	04. 1 jenis				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
		05. Pengiriman surat	05. Pengiriman surat	05. 1 paket	05. 1 paket				
		06. Belanja Alat kebersihan	06. Belanja Alat kebersihan	06. 14 jenis	06. 4 jenis				
		07. Logistik Coolroom	07. Logistik Coolroom	07. 1 Paket	07. 1 Paket				
		08. Pengisian tabung pemadam kebakaran	08. Pengisian tabung pemadam kebakaran	08. 23 unit	08. 23 unit				
		09. Belanja telpon, air, listrik dan fax	09. Belanja telpon, air, listrik dan fax	09. 12 Bulan	09. 12 Bulan				
		10. Belanja pulsa aduan masyarakat	10. Belanja pulsa aduan masyarakat	10. 1 tahun	10. 1 tahun				
		11. Belanja Surat Kabar	11. Belanja Surat Kabar	11. 3 jenis	11. 3 jenis				
		12. Belanja biaya fax	12. Belanja biaya fax	12.12 bulan	12. 12 bulan				
		13. Belanja cetakan	13. Pembayaran PBB	13. 8 Jenis	13.1 tahun				
		14. Retribusi sampah	14. Retribusi sampah	14. 12 bulan	14. 12 bulan				
		15. Belanja Jasa kebersihan kantor	15. Belanja Jasa kebersihan kantor	15. 12 Jenis	15. 12 Jenis				
		16. Belanja jasa pest control	16. Belanja jasa pest control	16. 1 paket	16.1 paket				
		17. KIRS R4 (mobil pick up)	17. KIRS R4 (mobil pick up)	17. 2 kali	17.2 kali				
		18. STNK R4	18. STNK R4	18. 1 tahun	18.1 tahun				
		19. STNK R2	19. STNK R2	19. 1 tahun	19.1 tahun				
		20. Belanja cetakan	20. Belanja cetakan	20. 1 paket	20.1 jenis				
1.02.1.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Pengelolaan keuangan	1. Pengelolaan keuangan	1. 12 bulan	1. 12 bulan	Rp 827,059,200.00	Rp 822,919,200.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
		2. pengadministrasi kepegawaian	2. pengadministrasi kepegawaian	2. 12 bulan	2. 12 bulan				
		3. Pegawai Honorer/PTT	3. Pegawai Honorer/PTT	3. 9 jenis	3. 11 bulan				
		4. Jasa Keamanan Kantor	4. Jasa Keamanan Kantor	4. 1 tahun	4. 1 tahun				
1.02.1.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Belanja makan minum rapat	1. Belanja makan minum rapat	1) 3250 ob	1) 1200 ob	Rp 264,241,000.00	Rp 53,048,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		2. Perjalanan Dinas dalam Daerah	2. Perjalanan Dinas dalam Daerah	2) 1 tahun	2) 0				
		3. Perjalanan Dinas Luar daerah	3. Perjalanan Dinas Luar daerah	3) 1 Tahun	3) 1 Tahun				
1.02.1.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
1.02.1.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1) Belanja pengadaan laptop	1. Tenda Pos Kesehatan	1) 4 Unit	1. 4 Unit	Rp 262,200,000.00	Rp 62,200,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		2) Belanja pengadaan komputer	2. Belanja pengadaan CCTV	2) 4 Unit	2. 1 buah				
		3) Belanja pengadaan CCTV	3. Scanner	3) 1 Unit	3. 1 unit				
		4) LED Monitor		4) 7 Unit					
		5) Scanner		1 Unit					
1.02.1.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1. Pemeliharaan lift gudang farmasi	1. Pemeliharaan lift gudang farmasi	1. 4 Kali	1. 4 Kali	Rp 160,000,000.00	Rp 133,805,533.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2. 1 tahun	2. 1 tahun				
			3. Pemindahan Genset		3. 1 unit				
1.02.1.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasion	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	Kendaraan roda 4 sebanyak 23	Kendaraan roda 4 sebanyak 23	Rp 261,580,000.00	Rp 157,385,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1.02.1.02.01.00.02.005	al			Unit dan roda 2 sebanyak 35 Unit	Unit dan roda 2 sebanyak 27 Unit				
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1) Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor	1) Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor	1) 4 jenis	1) 3 jenis	Rp 93,970,000.00	Rp 87,985,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		2) Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor;	2) Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor	2) 6 jenis	2) 6 jenis				
		3) Belanja Pemeliharaan mebelair	3) Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Menara	3) 1 Paket	3) 1 jenis				
1.02.1.02.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								
1.02.1.02.01.00.03.001	Pengembangan ISO	1. laporan audit internal	Dinas Kesehatan DIY tersertifikasi ISO 9001:2015	1) 2 laporan	1 tahun	Rp 81,130,000.00	Rp 45,515,500.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		2) Surveilans audit;		2) 1 rekomendasi					
		3) survei kepuasan masyarakat		3) 2 Laporan					
		4) Kajian Manajemen		4) 2 kali					
		5) Bimbingan Teknis SMM ISO		5) 35 orang					
		6) . Aparatur Dinkes terorientasi implementasi budaya satriya.		6) 1 orang					
1.02.1.02.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	1)Angka kredit jabatan fungsional	1)Angka kredit jabatan fungsional	1) 1 Dokumen	1) 1 Dokumen	Rp 6,345,000.00	Rp 0.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
		2) Penilaian AK dan rekomendasi UKOM	2) Penilaian AK dan rekomendasi UKOM	2) 2 Dokumen PAK dan rekomendasi UKOM	2) 2 Dokumen PAK dan rekomendasi UKOM				
1.02.1.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								
1.02.1.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan SKPD	26 Dokumen	26 Dokumen	Rp 11,141,000.00	Rp 4,300,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
1.02.1.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7. Buku Profil Kesehatan Tahun 2019	6. Buku Profil Kesehatan Tahun 2019	7. 1 dokumen	6. 1 Dokumen	Rp 195,404,000.00	Rp 69,015,280.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
	6. Buku Data Kesehatan Tahun 2019	5. Buku Data Kesehatan Tahun 2019	6. 1 dokumen	5. 1 Dokumen					
	1. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1. 1 Dokumen	1. 1 Dokumen					
	2. Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022	2. Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022	2. 1 Dokumen	2. 1 Dokumen					
	3. Pengembangan aplikasi/software/website pendukung kinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas DIY	3. Jumlah materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini	3. 1 Paket	3. 180 Materi					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
		4. Jumlah materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini	4. Rekomendasi hasil Penelitian Kesehatan	4. 180 Materi	4. 1 Dokumen Rekomendasi				
		5. Rekomendasi hasil Penelitian Kesehatan		5. 1 Dokumen Rekomendasi					
1.02.1.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	11 program 25 kegiatan	11 program 25 kegiatan	Rp 11,997,000.00	Rp 4,300,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
1.02.1.02.01.00.15	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT								
1.02.1.02.01.00.15.002	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	01. Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ;	01. Dukungan mitra ormas dalam desa siaga	01. 80 desa	01. 20 mitra	Rp 1,038,220,000.00	Rp 129,595,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		02. Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan	02. Dukungan mitra ormas dalam Germas	02. 1774 sekolah	02. 20 Mitra				
		03. Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	03. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas;	03. 72 puskesmas	03. 193 unit;				
		04. RS dilakukan IKL	04. Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis	04. 46 RS	04. 50 desa				
		05. Pasar dilakukan IKL	05. Kesepakatan strategi pembinaan kabupaten/kota sehat	05. 90 pasar	05. 1 dokumen				
		06. Hotel dilakukan IKL	06. Kampanye Kesehatan	06. 333 hotel	06. 3 jeni				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
		07. Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)	07. Kab/kota melakukan IKL TT	07. 5 Kab Kota	07. 5 Kab/Kota				
		08. Kampanye GERMAS		08. 5 kab/kota					
		09. Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan		09. 4 Kab/kota					
		10. Penerbitan Majalan Mensana		10. 2 edisi					
		11. Media Promosi Film/Iklan Layanan Masyarakat		11. 1 paket					
		12. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas		12. 193 unit					
		13. Puskesmas Melaksanakan Kesehatan olahraga		13. 121 Puskesmas					
		14. Bantuan Khusus Keuangan Jamban Sehat Untuk Masyarakat Miskin di DIY		. Rp3,378,000,000,00					
1.02.1.02.01.00.15.003	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga	1. Kabupaten/ Kota melaksanakan surveilans gizi	1. Kabupaten/ Kota melaksanakan surveilans gizi	1. 3 kabupaten/kota	3 Kab/kota	Rp 765,577,000.00	Rp 72,487,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		2. Sosialisasi hasil riset gizi	2. Sosialisasi hasil riset gizi	2. 150 orang	150 orang				
		3. Pendampingan ibu hamil oleh tenaga terlatih	3. Pendampingan ibu hamil oleh tenaga terlatih	3. 1500 orang	3. 1500 orang				
		4. Evaluasi PWS KIA		4. 3 kabupaten/kota					
		5. Desa melaksanakan pemantauan kasus gizi		5. 10 desa					
1.02.1.02.01.00.15.004	Kegiatan Penyehatan	Rencana usulan DAK 2021 DIY	Jumlah lintas sektor perwakilan masyarakat	1 dokumen	2500 Orang	Rp 5,074,676,000.00	Rp 6,484,676,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
	Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat (DAK)		terpapar informasi penanggulangan bencana						
		Kampanye institusi sejahtera	Media promosi kesehatan paru	1 kali	10 Jenis				
		Juklak/Juknis Institusi Sejahtera	Model Sekolah Sehat dilakukan pembinaan	1 dokumen	2 Dokumen				
		Perwakilan keluarga penderita ODGJ mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan kesehatan jiwa	Workshop Ujicoba Modul Pendampingan Ibu Hamil (OSOC)	90 Orang	1 Dokumen				
		Nakes yang mendapatkan diklat tatalaksana kasus psikotik	Rekomendasi Hasil audit kematian ibu/bayi	57 nakes	11 Rekomendasi				
		Petugas kesehatan meningkat pengetahuannya dalam deteksi dini gangguan kejiwaan	Cetak media promosi kesehatan lingkungan	120 orang	1 Jenis				
		Petugas surveilans dan laboratorium RS meningkat pemahamannya dalam rangka kewaspadaan dini dan penanggulangan penyakit	APD sanitarian	161 orang	1 Jenis				
		Petugas surveilans dan laboratorium puskesmas meningkat pemahamannya terkait kewaspadaan dini dan penanggulangan penyakit	Bahan kimia penanggulangan Covid-19	247 orang	2 Jenis				
		Sampel Penyakit Potensial KLB yang diperiksa	Fasyankes tersosialisasi pengelolaan limbah medis sesuai standar	1 Paket	40 Unit				
		Nakes fasyankes swasta meningkat pemahamannya tentang surveilans Campak dan Rubella	Media promosi Kesehatan Keselamatan Kerja	240 orang	1 Jenis				
		Kesepakatan pengelolaan program surveilans CRS	Fasyankes dan Perusahaan tersosialisasi PAK	1 dokumen	40 Unit				
		Percepatan eliminasi campak dan rubella terpantau	Kampanye Kesehatan	1 dokumen	3 Jenis				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
		Kesepakatan dalam rangka percepatan eliminasi Campak dan Rubella	Media Promosi Kesehatan	1 Dokumen	10 Jenis				
		Rekomendasi pencegahan dan pengendalian penyakit	Usulan DAK 2021 DIY	2 dokumen	1 Dokumen				
		Stakeholder meningkat pemahamannya terkait stigma HIV/AIDS	Juklak/Juknis Institusi Sejahtera	60 orang	1 Paket				
		Penanggulangan Diare Terpantau	Sampel Penyakit Potensial KLB yang diperiksa	5 Kab/ Kota	1 Dokumen				
		Kesepakatan penanggulangan diare	Stakeholder meningkat pemahamannya terkait stigma HIV/AIDS	1 dokumen	60 orang				
		Mahasiswa/ usia produktif dilakukan skrining kesehatan	Penanggulangan Diare Terpantau	5000 orang	5 Kab/ Kota				
		Data kebugaran ASN Pemda DIY	Kesepakatan penanggulangan diare	110 orang	1 dokumen				
		Nakes Fasyankes meningkat pemahamannya mengenai penyakit akibat kerja	Pengadaan skrining kesehatan untuk mahasiswa	60 orang	1 Dokumen				
		Nakes meningkat pemahamannya dalam Komunikasi antar pribadi	Kesepakatan tindak lanjut Intervensi Promkes dalam PISPK	30 orang	1 Dokumen				
		Kesepakatan tindak lanjut Intervensi Promkes dalam PISPK	Kesepakatan lintas program - lintas sektor dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Posyandu	1 dokumen	1 dokumen				
		Bus Trans Jogja terpasang Branding Sticker	Nakes meningkat pemahamannya tentang Implementasi PISPK indikator KIA	12 bus	30 orang				
		Masyarakat/ Lintas sektor mendapatkan informasi tentang hidup sehat tanpa tembakau	Penilaian Aksi Konvergensi Stunting	200 orang	1 dokumen				
		Masyarakat/ Lintas sektor mendapatkan informasi tentang kesehatan		800 orang					
		Masyarakat mendapatkan		100 orang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja								
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
		informasi tentang PPOK										
		Masyarakat mendapatkan informasi tentang TB			100 orang							
		Jumlah desa/ dusun mendapatkan sosialisasi tentang Germas			48 lokasi							
		Jumlah lintas sektor/ perwakilan masyarakat terpapar informasi penanggulangan bencana			2500 orang							
		Kesepakatan lintas program - lintas sektor dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Posyandu			1 dokumen							
		Forum CSR Bidang Kesehatan terbentuk			1 Forum							
		SBH Kabupaten Kota meningkat peran sertanya dalam program kesehatan			5 kab/ kota							
		Intervensi Peningkatan Kualitas Kesling terpantau			5 kab/ kota							
		Hasil Penilaian LBS PHBS			1 dokumen							
		Rekomendasi Monev Pengelolaan Limbah medis di fasyankes			2 dokumen							
		Penjamah Makanan Meningkatkan pemahamannya tentang Higiene dan Sanitasi			60 orang							
		Nakes meningkatkan pemahamannya tentang Implementasi PISPK indikator KIA			30 orang							
		Rekomendasi Hasil audit kematian ibu/ bayi			6 rekomendasi							
		Model Sekolah Sehat dilakukan pembinaan			8 model							
		Kurikulum dan Modul OSOC			2 dokumen							
		Penilaian Aksi Konvergensi Stunting			1 dokumen							
1.02.1.02.01.00.15.005	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga (DAK)	Balita kurus mendapatkan makanan tambahan	Balita kurus mendapatkan makanan tambahan	3557 orang	3557 orang	Rp 2,480,159,000.00	Rp 2,480,159,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
		Ibu Hamil KEK mendapatkan Makanan Tambahan	Ibu Hamil KEK mendapatkan Makanan Tambahan	3808 orang	3808 orang				
1.02.1.02.01.00.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT								
1.02.1.02.01.00.16.001	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	1. Anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	1. Anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	01.96 %	01.80 %	Rp 1,606,223,000.00	Rp 1,606,139,800.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		2. Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	2. Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	02.91 %	02.80 %				
		3. Persentase Pengamatan Epidemiologi kurang dari 24 jam	3. Persentase Pengamatan Epidemiologi kurang dari 24 jam	03.100 %	03.100 %				
1.02.1.02.01.00.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT								
1.02.1.02.01.00.16.002	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	01. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan gerakan 1R1J	01. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan gerakan 1R1J	1) 5 kab/kota	1) 5 kab/kota	Rp 1,273,479,000.00	Rp 597,800,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		02. Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia	02. Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia	2) 83,76 persen	2) 83,76 persen				
		03. Jumlah Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	03. Jumlah Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	3) 75 klinik	3) 75 klinik				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
		04. Jumlah DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care)	04. Jumlah DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care)	4) 100 DPS	4) 100 DPS				
		05. Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV	05. Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV	5) 30 faskes	5) 30 faskes				
		06. Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	06. Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	6) 5 kab/kota	6) 5 kab/kota				
		07. Jumlah Kab/ Kota yang melakukan posbindu sesuai standar	07. Jumlah Kab/ Kota yang melakukan posbindu sesuai standar	7) 5 kabupaten/kota	7) 5 kabupaten/kota				
		08. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pandu PTM	08. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan skrining jiwa	8) 5 kabupten/kota	8) 5 kabupaten/kota				
		09. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan skrining jiwa	09. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan deteksi dini kanker (Sadanis dan IVA Test)	9) 5 kabupaten/kota	09) 5 kabupaten/kota				
		10. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan deteksi dini kanker (Sadanis dan IVA Test)	10. Hibah kelembagaan KPAD	10) 5 kabupaten/kota	10) Rp500.000.000,-				
		11. Hibah kelembagaan KPAD		11) Rp500.000.000,-					
1.02.1.02.01.00.17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN								
1.02.1.02.01.00.17.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	9) Hibah Kelembagaan PMI	9) BKK dukungan alat kesehatan RSUD Wates	9) Rp. 500.000.000,00	9) 1 Paket	Rp 159,717,000.00	Rp 139.080.900.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		8) Pengadaan panel LVMDP, IPAL, trafo, kabel feeder, ruang OK 4 pada RSUD WATES	8) Hibah Kelembagaan PMI	8) 5 Jenis	8) Rp. 500.000.000,00,				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
		7) BKK tahap III RSUD Wates	7) Pengadaan panel LVMDP, IPAL, trafo, kabel feeder, ruang OK 4 pada RSUD WATES	7) 100 %	7) 5 Jenis				
		6) Event penting mendapatkan pelayanan P3K	6) BKK tahap III RSUD Wates	6) 100 %	6) 100 %				
		5) Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	5) Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	5) 60 Faskes	5) 30 Faskes				
		4) Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan	4) Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan	4) 2 lab	4) 2 lab				
		3) Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan	3) Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan	3) 60 RS	3) 60 RS				
		2) Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	2) Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	2) 30 klinik	2) 30 klinik,				
		1) Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	1) Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	1) 100 puskesmas	1) 100 puskesmas				
1.02.1.02.01.00.17.005	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	1. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	1. Tim FKTP Berprestasi	121 puskesmas	1. 2 Dokumen	Rp 258,762,000.00	Rp 4,535,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
		2. Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	2. RS yang mendapatkan pembinaan mutu	20 klinik	2. 8 RS				
		3. RS yang mendapatkan pembinaan mutu		3. 60 RS					
		4. Laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu		4. 3 labkes					
1.02.1.02.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN								
1.02.1.02.01.00.18.001	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	1. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	1. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	1. 241 FKTP	1. 121 FKTP	Rp 377,748,000.00	Rp 34,514,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		10. Tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	2. FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	10. 100%	2. 6 FKTL				
		2. Jumlah FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	3. Tenaga kesehatan yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan	2. 50 FKTL	3. 25 tenaga kesehatan				
		3. Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA) terintegrasi dengan aplikasi kab/kota	4. Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perijinan	3. 3 Kab/Kota	4. 100%				
		4. FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	5. Pembinaan Organisasi Profesi	4. 40 FKTL	5. 20 Organisasi profesi				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
		5. Tenaga kesehatan yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan	6. Pembinaan Wahana Program Dokter Internsip Indonesia (PIDI)	5. 25 tenaga kesehatan	6. 17 wahana				
		6. Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perijinan	7. Pembinaan perijinan tenaga dan sarana kesehatan	6. 100%	7. 5 Kab/kota				
		7. Pembinaan Organisasi Profesi	8. Tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	7. 20 organisasi profesi	8. 100%				
		8. Pembinaan Wahana Program Dokter Internsip Indonesia (PIDI)		8. 17 wahana					
		9. Pembinaan perijinan tenaga dan sarana kesehatan		9. 5 kabupaten/kota					
1.02.1.02.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	1. Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian	02. Perbekkes (Perbekalan Kesehatan) dan obat bufferstock	1. 40 fasyankes	02. 1 Paket	Rp 382,427,000.00	Rp 309,867,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		2. Jumlah sarana produksi dan distribusi makanan yang dibina	01. Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian	2. 30 sarana	02. 3 Fasyankes				
		3. Perbekkes (Perbekalan Kesehatan) dan obat bufferstoc		3. 1 paket					
		04. Sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang mendapatkan pembinaan		04. 15 sarana					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1.02.1.02.01.00.18.005	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) (DAK)	Jumlah pengiriman obat dan perbekes	Jumlah pengiriman obat dan perbekes	12 kali	8 bulan	Rp 33,505,000.00	Rp 33,505,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
1.02.1.02.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES								
1.02.1.02.01.00.19.001	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	01. Masyarakat memanfaatkan layanan Balabkes	01. Masyarakat memanfaatkan layanan Balabkes	01. 12.789 customer	01. 10.200 customer	Rp 12,448,992,000.00	Rp 12,810,726,682.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
1.02.1.02.01.00.19.002	Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DAK)	Peralatan Kalibrasi	Peralatan Kalibrasi	12 macam	12 macam	Rp 1,094,212,000.00	Rp 1,094,212,000.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
1.02.1.02.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES								
1.02.1.02.01.00.20.001	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah Pelatihan yang Diselenggarakan	Jumlah Pelatihan yang Diselenggarakan	22 pelatihan	7 pelatihan	Rp 6,308,694,432.00	Rp 6,510,349,078.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
1.02.1.02.01.00.21	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESOS								
1.02.1.02.01.00.21.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan	01. Cakupan Jamkes Penyangga	01. Cakupan Jamkes Penyangga	01. 100%	01. 100%	Rp 39,973,855,760.00	Rp 32,033,924,065.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
		02. Cakupan Jamkes Preventif	02. Cakupan Jamkes Preventif	02. 8%	02. 8%				
		03. Cakupan Jamkes Rehabilitatif	03. Cakupan Jamkes rehabilitatif	03.15%	03. 15%				
1.02.1.02.01.00.22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA								
1.02.1.02.01.00.22.001	Pelayanan Kesehatan Jiwa	01. Pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan	01. Pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan	01. Jumlah praktikan : 2.700, Jumlah kunjungan diklat : 6.200 kunjungan	01. Jumlah praktikan : 2.700, Jumlah kunjungan diklat : 6.200 kunjungan	Rp 22,116,846,440.00	Rp 26,015,150,900.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		02. Penanganan pasien	02. Penanganan pasien	02. Rawat Inap : 2.300 pasien, Rawat Jalan : 49.000 pasien	02. Rawat Inap : 2.300 pasien, Rawat Jalan : 49.000 pasien				
1.02.1.02.01.00.22.002	Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)	3. Pengadaan Mesin Pengereng Instalasi Laundry	3. Pengadaan Mesin Pengereng Instalasi Laundry	1 unit	1 unit	Rp 2,250,940,429.00	Rp 2,250,940,429.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
		2. Pembangunan Gedung Isolasi	2. Pembangunan Gedung Isolasi	1 Paket	1 paket				
		1. Pembangunan Gedung HCU	1. Pembangunan Gedung HCU	1 paket	1 Paket				
1.02.1.02.01.00.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA								
1.02.1.02.01.00.23.001	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	Penanganan pasien RSP Respira	Penanganan pasien RSP Respira	21722 pasien	15200 pasien	Rp 16,933,036,000.00	Rp 24,744,745,497.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD
1.02.1.02.01.00.23.002	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	IPAL RS	IPAL RS	1 unit	1 unit	Rp 1,702,386,571.00	Rp 1,702,386,571.00	- Reguler APBD	- Reguler APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
				Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
	(DAK)								
		TOTAL				Rp 120,034,267,832	Rp 121,689,526,935		

BAB 5 PENUTUP

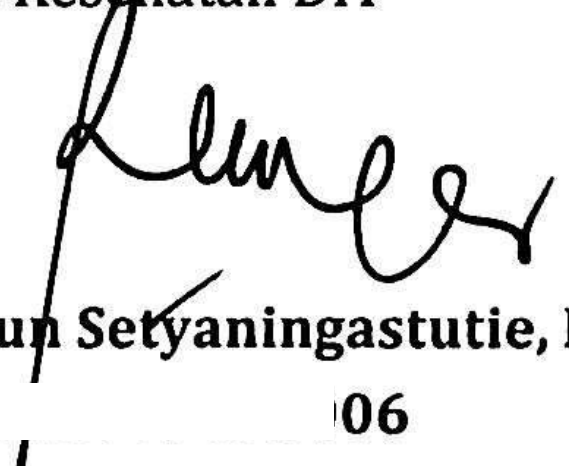
Dokumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2020 pada SKPD Dinas Kesehatan DIY. Dokumen Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai penyempurnaan dari dokumen Rencana Kerja 2020 dan merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY 2020.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2020 diharapkan menjadi acuan penyelarasan dalam penetapan anggaran baik melalui sumber dana APBD DIY maupun dana dekonstrasi serta sumber dana lainnya. Selain itu, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan program/kegiatan yang berkelanjutan.

Demikian, Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2020 disusun melalui berbagai mekanisme proses perencanaan program dan anggaran dengan harapan menjadi dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yogyakarta, 28 Agustus 2020

Kepala Dinas Kesehatan DIY


drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes
NIP.196 / 06